

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mensejahterakan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian perekonomian suatu wilayah (Damanik et al., 2018).

Salah satu yang menjadi akar permasalahan dari pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antar masyarakat atau perbedaan pendapatan antar daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya dispritas antar daerah. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek pembesaran ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas yang tidak terjadi secara sempurna (Hindun et al., 2019).

Perkembangan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi adalah topik ekonomi pembangunan dan isu pemerintahan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara kedua variabel ini dalam kehidupan masyarakat dan stabilitas sosial (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Ketimpangan pendapatan tidak lepas dari angka rasio gini. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh (BPS, 2016). Nilai Koefisien Gini berkisar dari 0 hingga 1, 0 menunjukkan pemerataan sempurna, 1 memperlihatkan ketidakmerataan sempurna. Nilai Indeks Gini $< 0,4$ menunjukkan ketimpangan rendah, $0,4 - 0,5$ menunjukkan ketimpangan sedang, dan $> 0,5$ menunjukkan ketimpangan tinggi.

Jawa Timur terdiri 27 Kabupaten dan 9 Kota yaitu, Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. dan Kota Batu. Perkembangan Indeks Gini di Jawa Timur selama periode 2016 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 1-1.

Tabel 1-1 memperlihatkan setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki Indeks Gini yang fluktuatif. Pada tahun 2016 dan 2017 Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata Indeks Gini 0,4 yang artinya termasuk ke dalam ketimpangan sedang. Sedangkan pada 2 tahun setelahnya yaitu 2018 dan 2019 Jawa Timur memperbaiki ketimpangan tersebut dan mencatat penurunan tersebut diangka 0,37 yang berarti pada tahun 2018 dan 2019 Provinsi Jawa Timur memiliki Ketimpangan rendah.

Tabel 1-1

Indeks Gini di Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2019

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kab. Pacitan	0,36	0,32	0,35	0,39
Kab. Ponorogo	0,36	0,34	0,35	0,34
Kab. Trenggalek	0,39	0,35	0,38	0,37
Kab. Tulungagung	0,37	0,35	0,37	0,30
Kab. Blitar	0,34	0,37	0,38	0,33
Kab. Kediri	0,38	0,34	0,33	0,29
Kab. Malang	0,32	0,35	0,38	0,38
Kab. Lumajang	0,35	0,31	0,32	0,29
Kab. Jember	0,31	0,34	0,33	0,30
Kab. Banyuwangi	0,33	0,34	0,31	0,31
Kab. Bondowoso	0,35	0,32	0,35	0,30
Kab. Situbondo	0,35	0,33	0,36	0,31
Kab. Probolinggo	0,31	0,36	0,34	0,32
Kab. Pasuruan	0,32	0,34	0,32	0,30
Kab. Sidoarjo	0,37	0,34	0,34	0,31
Kab. Mojokerto	0,30	0,32	0,30	0,27
Kab. Jombang	0,34	0,34	0,32	0,33
Kab. Nganjuk	0,36	0,33	0,31	0,42
Kab. Madiun	0,34	0,32	0,33	0,33
Kab. Magetan	0,37	0,39	0,38	0,35
Kab. Ngawi	0,34	0,34	0,35	0,33
Kab. Bojonegoro	0,32	0,29	0,34	0,30
Kab. Tuban	0,33	0,31	0,36	0,29
Kab. Lamongan	0,30	0,32	0,31	0,31
Kab. Gresik	0,33	0,29	0,27	0,28
Kab. Bangkalan	0,31	0,30	0,28	0,31
Kab. Sampang	0,31	0,29	0,25	0,26
Kab. Pamekasan	0,36	0,33	0,33	0,33
Kab. Sumenep	0,31	0,24	0,24	0,30
Kota. Kediri	0,39	0,40	0,32	0,32
Kota. Blitar	0,41	0,39	0,35	0,33
Kota. Malang	0,41	0,42	0,41	0,34
Kota. Probolinggo	0,31	0,37	0,31	0,26
Kota. Pasuruan	0,40	0,38	0,34	0,30
Kota. Mojokerto	0,37	0,39	0,34	0,30
Kota. Madiun	0,42	0,36	0,35	0,34
Kota. Surabaya	0,39	0,39	0,35	0,40
Kota. Batu	0,34	0,30	0,32	0,31
Jawa Timur	0,40	0,40	0,37	0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Wilayah-wilayah di Jawa Timur yang memiliki Indeks Gini tertinggi pada awal tahun 2016 yaitu kota Madiun sebesar 0,42, kota Blitar 0,41, kota Malang

0,40, kota Pasuruan 0,40, kota Surabaya 0,39, kota Kediri 0,39, dan kabupaten Trenggalek sebesar 0,39. Sedangkan di akhir tahun yaitu 2019 wilayah dengan indeks gini tertinggi adalah kabupaten Nganjuk sebesar 0,42, kabupaten Pacitan 0,39, kabupaten Malang 0,38 dan Kota Surabaya sebesar 0,40. Dari perbandingan kondisi tahun 2010 dan 2019 terlihat jumlah wilayah yang memiliki indeks gini yang tinggi menurun, yang berarti kondisi pemerataan pendapatan di wilayah Jawa Timur membaik. Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, yang dapat dilihat dari adanya perbedaan pendapatan (Rahmadi & Parmadi, 2019).

Menurut Wiguna & Panennungi (2019), faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan antara lain: (1) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, (2) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan produksi barang-barang, (3) Ketidakmerataan antar daerah, (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal, sehingga proporsi pendapatan modal lebih besar dibanding dengan proporsi pendapatan tenaga kerja, dan pengangguran bertambah, (5) Rendahnya mobilitas sosial, (6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, (7) Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakmerataan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang. (8) Hancurnya sentra industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Beberapa penelitian menemukan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh variabel inflasi Prastiwi et al. (2018), jumlah penduduk miskin Hindun et al. (2019), pengangguran Astuti et al. (2017), Investasi PMDN dan PMA Damanik et al. (2018), upah minimum dan pendidikan (Islami et al., 2019).

Penelitian ini akan mengamati analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019.

C. Tujuan Penelitian

Menghitung arah dan besarnya pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan untuk menanggulangi masalah ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya rujukan atau pustaka mengenai faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan. Selain itu

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar tertarik meneliti tentang ketimpangan pendapatan.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat dan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang merupakan modifikasi dari artikel Damanik et al. (2018) yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah. 7 (1) dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PP_{it} + \beta_2 \log PDRB_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 \log UMK_{it} + \beta_5 \log JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

IG	: Indeks Gini
PP	: Pengeluaran Pemerintah (%)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (%)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (%)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)
JP	: Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
ε	: Error term (Faktor Kesalahan)
β_0	: Konstanta
$\beta_0 \dots \beta_5$: Koefisien regresi variabel independent
i	: observasi ke i
t	: tahun ke t

E.2. Data dan Sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data cross section yang meliputi 36 wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dan time series dengan rentang pengamatan dari 2016 hingga 2019. Data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Jawa Timur (BPS).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, hubungan antarvariabel, penelitian terdahulu, dan di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, definisi variasi, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menampilkan hasil analisis data, interpretasi hasil analisis data, dan interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta bagi penelitian yang selanjutnya.